

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : Kabupaten Tegal

Halaman 4

## Kontribusi PAD PPP Tegalsari Meningkat

### Semester Pertama 2017 Mencapai Rp 2,221M

**TEGAL** - Kinerja Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, Kota Tegal, sangat bagus. Nilai produksi ikan terus meningkat, sehingga berpengaruh terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jateng.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi C DPRD Jateng Sri Hartini, disela-sela kunjungan kerja (KK) ke PPP Tegalsari, Kota Tegal, kemarin. Menurutnya, pendapatan yang dibukukan per Juli mencapai Rp 2,221 miliar.

"Jumlah itu 80% lebih banyak dibanding pendapatan setahun 2016 lalu yang mencapai Rp 1,235 miliar. Patut diacungi jempol," ungkapnya.

Sementara itu anggota Komisi C Wahyudin Noor Aly meminta pengelola PPP Tegalsari untuk menyiapkan rencana bisnis 2018. Ini mengingat sejumlah potensi pendapatan yang potensial tidak dapat direalisasi atau hilang.

Hal itu terkait dengan UU nomor 7/2017 tentang Perlindungan Nelayan dan aturan

turunannya, terutama Permenhub yang mewajibkan seluruh kapal melakukan pengukuran ulang.

Dalam catatan Goyud, begitu biasa Wahyudin Noor Aly disapa, ada dua hal yang bisa menjadi kendala dalam penerimaan PAD. Pertama seperti disinyalir Menteri Perikanan dan Kelautan banyak kapal yang melakukan ukur ulang ternyata lebih 30 gross ton (GT).

"Kalau benar 90 persen kapal di sini setelah ukur ulang ternyata di atas 30 GT, kemudian izinnya tidak lagi di sini melainkan di Jakarta seperti amanat UU, maka berapa potensi pendapatan yang hilang di 2018 nanti?" katanya.

Yang kedua, tambah Goyud, pemerintah sering ingin membantu masyarakat kecil, seperti dalam UU tentang Perlindungan Nelayan yang memperluas kepemilikan kapal nelayan kecil dari 5 GT menjadi 10 GT.

Padahal sering salah sasaran karena

konsepnya keliru. "Di lapangan apakah benar pemilik kapal ukuran 5 GT hingga 10 GT itu nelayan kecil atau malah juragan?" katanya.

Menurut UU kapal ukuran 10 GT tidak dikenai pungutan apa pun termasuk izin. Berarti obyek PAD hanya kapal ukuran 10 GT hingga 30 GT.

Kontribusi PAD dari PPP Tegalsari, memang terus meningkat. Ini bisa dilihat tahun 2014 Rp 801,9 juta, meningkat 32,7% pada 2015 menjadi Rp 1,064 miliar. Naik lagi 16,1% pada 2016 menjadi Rp 1,235 miliar. Adapun pendapatan tahun ini tercatat per Juli sudah mencapai Rp 2,221 miliar.

Pendapatan sebesar itu berasal dari sembilan pos. Antara lain dari sewa lahan/bangunan, jasa tambat labuh, izin usaha perikanan, pas masuk pelabuhan dan lainnya.

Sejalan, meski volume produksinya fluktuatif, namun nilai produksi ikan yang didaratkan di PPP Tegalsari juga meningkat terus. Pada periode yang sama tahun 2014 sebesar Rp 490,693 miliar,

tahun 2015 melonjak menjadi Rp 621,889 miliar dan masih naik menjadi Rp 649,943 miliar (2016). Sedang tahun ini per Juli

telah mencapai Rp 205,239 miliar. Namun agaknya 'pesta' itu akan sulit diulang pada tahun 2018 nanti. (adv/udi)